

# KEUANGAN PUBLIK DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sadu Wasistiono<sup>85</sup>

## Abstract :

*Although decentralization and autonomy is exercised since Indonesian republic is formed, but they are not developed such as in West Countries, because it is not a panacea for the ill state or especially local government. Theoretically, there are many prerequisites of decentralization and autonomy that should called attention to the civil servants whose governed the local government. Many theoreticians written down about decentralization, included the advantages and disadvantages of it, the prerequisites should be fulfilled to apply it.*

*Decentralization means that there are transfer of authority and responsibility in public function from central government to local government, other semi public agenda and also to the private sector. Also there are opinion about form and type of decentralization. The interesting things is the type of decentralization which divided decentralization into 4 types namely political, administrative, fiscal, economic and market decentralization.*

*The aim of fiscal decentralization is to transfer the source of the financial to local such as the right to own and manage their own properties and the right to manage their human resources. But it is restricted by the upper rules, the well being of the people and should be applied properly.*

*Local government give more attention to how they can earn more revenue than how to used it. Actually many infraction is occurred in the expenditures area. Local government is facing constraint with the fiscal decentralization relating with the source of the revenue. Central government still have right to attract revenue from local government, the effect is the state give balance aid to complete APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). So central government still become the importance role in public decentralization*

*The expenditure part in APBD is consist of two parts, routine budget and development budget. In reality, both of them is used for the sake of the local government itself. Nowadays the routine budget is bigger than development budget. All of this constraint can be suremount if, the local government has human resources that competent in their tasks. Once again central government didn't give a guide to the local government about the national Employee System, the effect is the local government can use by their own way about how to manage their civil servants.*

## A. PENDAHULUAN

Desentralisasi dan Otonomi Daerah dewasa ini sedang menjadi sorotan publik di Indonesia. Ada harapan-yang mungkin berlebihan-bahwa dengan otonomi daerah, berbagai masalah mendasar yang dihadapi oleh bangsa seperti maraknya KKN, gejala disintegrasi bangsa, kehidupan masyarakat yang tidak demokratis, akan dapat teratasi. Dikatakan berlebihan karena hal ikhwal otonomi bagi bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang baru, bahkan sejak jaman Hindia Belanda dahulu kita telah mengenal adanya undang-undang tentang desentralisasi (decentralisatie wet Stbld 1903/329). Selain itu, setelah Indoensia merdeka telah pula dibuat sekurang-kurangnya enam UU yang khusus mengatur tentang pemerintahan daerah. Kenyataan yang menunjukkan bahwa negara kita tidak mengalami kemajuan yang cukup berarti dibanding negara-negara lain yang setara. Artinya,

---

<sup>85</sup> Dosen STPDN, STIA LANRI. Konsultan Bidang Pemerintahan dan Manajemen

desentralisasi dan otonomi tidak dapat dianggap sebagai “panacea” untuk segala penyakit yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Ada berbagai prasyarat yang harus dipenuhi agar desentralisasi dan otonomi daerah membawa manfaat bagi kemajuan bangsa. Karena selain bersisi positif, desentralisasi dan otonomi daerah juga mengandung sisi negatif (lihat Campo dan Sundaram bekerjasama dengan Baylon. 2001 : 155)

Sisi positif dari desentralisasi dan otonomi daerah antara lain :

- 1) Dari segi politik, melalui desentralisasi akan dapat dikembangkan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis
- 2) Dari segi administrasi, melalui desentralisasi akan dapat dikembangkan system administrasi yang lebih efektif dan efisien
- 3) Dari segi kepentingan warga Negara, melalui desentralisasi akan lebih banyak kepentingan masyarakat setempat yang dapat diakomodasikan sehingga akan muncul kepuasan yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah
- 4) Munculnya semangat berkompetisi antar daerah sehingga mendorong berkembangnya kreativitas dan inovasi dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Mengenai sisi positif desentralisasi, Campo dan Sundaram bekerjasama dengan Baylon (2001: 155) mengemukakan bahwa desentralisasi penting untuk stabilitas politik, pemberian pelayanan yang lebih efektif, pengurangan kemiskinan serta untuk keadilan.

Sisi negatif dari desentralisasi dan otonomi daerah antara lain :

- 1) Munculnya rasa kedaerahan yang berlebihan
- 2) Munculnya pusat-pusat KKN baru
- 3) Terjadi kesenjangan antar-daerah yang dapat menimbulkan konflik sosial
- 4) Dapat mendorong terjadinya disintegrasi bangsa

Campo dan Sundaram bekerjasama dengan Baylon (2001:162) mengatakan bahwa desentralisasi mengandung berbagai resiko. **Pertama**, berkurangnya skal ekonomi yang mengarah pada inefisiensi serta mendorong terjadinya duplikasi dalam penggunaan sumber daya aparatur maupun peralatan. **Kedua**, menimbulkan masalah koordinasi dan mendorong terjadinya konflik-terutama pada negara-negara yang secara etnis heterogen. **Ketiga**, munculnya hambatan institusional yang justru menimbulkan inefisiensi-terutama apabila organisasi pemerintah lokal belum mampu menyelenggarakan manajemen secara baik.

**Keempat**, dapat lebih memperburuk tata pemerintahan dibandingkan meningkatkan keseluruhan pemerintahan yang sudah ada.

Agar desentralisasi dan otonomi daerah memberi manfaat yang positif bagi kemajuan bangsa dan negara ada berbagai prasyarat yang harus dipenuhi antara lain :

- 1) Adanya dukungan politik yang konsisten dari pemerintah pusat
- 2) Adanya kelegawaan dari pemerintah pusat untuk berbagi kewenangan, tanggungjawab serta sumber-sumber keuangan yang adil dan proporsional
- 3) Adanya kemauan politik dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjalani perubahan struktural, fungsional serta kultural secara bertahap dan berkesinambungan
- 4) Adanya perubahan yang mendasar dalam bidang manajemen pemerintahan daerah
- 5) Adanya kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat sehingga bersedia untuk saling membantu dengan komponen bangsa lainnya.

Pembahasan dalam tulisan ini akan difokuskan pada prasyarat perlunya perubahan secara mendasar dalam bidang manajemen, khususnya manajemen keuangan dan manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah.

## **B. MEMAHAMI DESENTRALISASI**

Sebelum membahas mengenai manajemen keuangan dan manajemen sumber daya aparatur dalam rangka otonomi daerah, ada baiknya apabila dipahami terlebih dahulu pengertian tentang desentralisasi. Menurut Litvack dan Seddon ( 1992 :2 ) bahwa desentralisasi adalah : “ *the transfer of authority and responsibility for public function from central government to subordinate or quasi-independent government organization or the private sector*”. Dengan demikian yang dimaksud desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggungjawab yang berkaitan dengan fungsi-fungsi publik. Transfer tersebut dilakukan dan berasal dari pemerintah pusat yang ditujukan ke tiga arah yaitu kepada :

1. Organisasi pemerintah subnasional (propinsi, kabupaten/kota)
2. Organisasi semi-bebas seperti badan otorita
3. Sektor privat

Pandangan di atas nampaknya merujuk pendapat Cheema dan Rondinelli (1983 : 18) yang mengatakan bahwa ada empat bentuk utama desentralisasi yaitu :

1. Dekonsentrasi
2. Delegasi kepada institusi semi otonom

3. Devolusi kepada pemerintahan lokal
4. Transfer fungsi dari publik kepada institusi pemerintah

Litvack dan Seddon (1999 :2) selanjutnya membagi desentralisasi menjadi 4 tipe, yaitu :

1. Desentralisasi politik
2. Desentralisasi administratif, yang memiliki 3 bentuk utama, yaitu
  - a. dekonsentrasi
  - b. delegasi
  - c. devolusi
3. Desentralisasi fiskal
4. Desentralisasi ekonomi atau pasar

Pada sisi lain, Campo dan Sundaram bekerjasama dengan Baylon (2001 : 155) membagi desentralisasi menurut dimensi dan derajadnya. Menurut dimensinya, desentralisasi meliputi desentralisasi geografi, desentralisasi fungsional, desentralisasi politik/administratif. Menurut derajadnya, desentralisasi meliputi dekonsentrasi, delegasi serta devolusi.

Desentralisasi politik bertujuan agar semangat demokratisasi yang berkembang di kalangan masyarakat dapat tersalur secara positif. Melalui desentralisasi politik, masyarakat luas dapat berpartisipasi aktif dalam proses perumusan, implementasi serta evaluasi kebijakan publik serta memanfaatkan hasilnya. Melalui desentralisasi politik dibentuk badan perwakilan serta pemerintah daerah setempat yang berfungsi membuat kebijakan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Desentralisasi administratif dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui desentralisasi administratif, berbagai aktivitas pemerintahan dapat dipilah dan dipilih untuk dipindahkan, diselenggarakan, dimintakan bantuan kepada pejabat-pejabat di luar pejabat pemerintah pusat yang ada di ibukota Negara.

Desentralisasi fiskal dimaksudkan sebagai langkah untuk mentransfer berbagai sumber-sumber keuangan untuk membiayai transfer kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah subnasional maupun badan pemerintah semi otonom. Bentuknya dapat berupa pembiayaan sendiri (*self-financing*), pembiayaan bersama (*co financing*), mengadakan pungutan, perluasan sumber-sumber lokal melalui pajak atau retribusi, transfer antar-pemerintah, serta pinjaman atau bantuan.

Desentralisasi ekonomi atau pasar dilakukan dalam bentuk privatisasi atau deregulasi dengan mengalihkan tanggung jawab berbagai fungsi dari pemerintah kepada sektor privat. Desentralisasi jenis ini dimaksudkan pula sebagai pemberian kebebasan kepada organisasi pemerintah di luar pemerintah pusat untuk membuat kebijakan sendiri dalam bidang ekonomi.

### **C. KEUANGAN PUBLIK DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Telah dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa melalui desentralisasi dibentuk daerah otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat. Kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang menjadi batas yurisdiksinya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, daerah otonom memiliki 4 (empat) hak dasar yang melekat, yaitu :

- 1) Hak untuk memiliki pemimpinnya sendiri secara bebas.
- 2) Hak untuk memiliki dan mengelola kekayaannya sendiri secara bebas
- 3) Hak untuk membuat aturan hukumnya sendiri secara bebas
- 4) Hak kepegawaian yang dapat digunakan secara bebas

Kebebasan dalam menggunakan hak-hak dasar di atas tidaklah bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh :

- 1) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau kesepakatan kesatuan masyarakat hukum yang lebih besar cakupannya
- 2) Kepentingan umum
- 3) Asas kepatutan

#### **Keuangan Publik**

Untuk menjalankan kewenangan dan tanggungjawab melayani kepentingan publik yang ditransfer kepada daerah otonom, diperlukan dukungan sumber-sumber keuangan publik. Makna dari keuangan publik adalah keuangan yang berasal dari publik, yang diperoleh berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh publik serta digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan publik. Secara garis besar, keuangan publik dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu :

- 1) penerimaan atau pendapatan
- 2) penggunaan atau belanja

UU Nomor 22 tahun 1999 dan juga UU lainnya tentang pemerintahan daerah yang ada di Indonesia selama ini nampaknya lebih banyak menyoroti keuangan publik dari segi penerimaan atau pendapatannya saja, kurang memberi perhatian pada sisi penggunaan atau belanja. Padahal kebocoran yang terbesar justru terjadi pada sisi penggunaan. Isi Bab VIII UU No 22 tahun 1999 yang mengatur tentang Keuangan Daerah memperkuat pernyataan tersebut.

Berdasarkan bunyi pasal 79 UU Nomor 22/1999 dapat diketahui ada 4 kelompok sumber pendapatan Daerah yaitu : a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) Dana Perimbangan; c) Pinjaman Daerah; d) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Dari data APBD tahun anggaran 2001 untuk 82 Kabupaten/Kota di Indonesia, dapat diketahui bahwa dana perimbangan menempati porsi terbesar dari APBD yaitu rata-rata 77 % (lihat lampiran 1) Kontribusi dana perimbangan terhadap APBD yang terkecil di Kabupaten Badung (Propinsi Bali), yakni 32 %. Sedangkan kontribusi yang terbesar di Kabupaten Kutai Kertanegara, yakni 99 %.

Data di atas menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia lebih banyak berbentuk transfer antar-pemerintah, bukan pemberian sumber-sumber keuangan yang digali oleh pemerintah Daerah sendiri dalam bentuk pajak dan atau retribusi. Pola tersebut sebenarnya tidak sehat karena membuat Pemerintah Daerah menjadi tergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal keuangan. Artinya, desentralisasi dalam aspek politik dan administrasi, ternyata belum diikuti dengan desentralisasi fiskal yang dapat membuat Pemerintah Daerah menjadi lebih mandiri dalam berbagai hal termasuk dalam menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri.

Lapangan pajak dan retribusi yang diberikan kepada daerah umumnya yang relatif “kurus”, sehingga tidak terlampaui menjanjikan. Pada sisi lain karena adanya pandangan bahwa daerah yang maju adalah daerah yang memiliki PAD besar, maka gejala umum yang nampak ialah Daerah berlomba-lomba menciptakan dan atau menaikkan pajak dan atau retribusi. Hal tersebut pada gilirannya justru bersifat kontraproduktif bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi belanja, masih digunakan pengelompokan anggaran rutin dan pembangunan yang tidak mencerminkan secara jelas mengenai besarnya belanja untuk kepentingan publik. Data pada lampiran 2 menunjukkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2001 untuk 82 Kabupaten/Kota di Indonesia 61,84 % untuk anggaran rutin, sedangkan 36,17 % untuk anggaran pembangunan. Anggaran rutin sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai.

Begitu pula pada anggaran pembangunan masih terdapat pengeluaran untuk honorarium pengelola proyek. Artinya sebagian besar APBD rata-rata digunakan untuk kepentingan birokrasi. Padahal menurut Campo dan Sundaram (2001 :221) bahwa : “*The government budget should be a financial mirror of society's economic and social choice*”

Persentase anggaran rutin yang lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan dapat disebabkan karena adanya perubahan peranan pemerintah daerah. Pada masa UU Nomor 5 /1974, pemerintah daerah banyak diberi peranan sebagai PROMOTOR PEMBANGUNAN, sedangkan pada masa UU Nomor 22 /1999, pemerintah daerah lebih banyak diposisikan sebagai PELAYAN MASYARAKAT. Penyebab lainnya adalah penyusunan APBD pada umumnya tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, melainkan perkiraan kebutuhan masyarakat menurut persepsi birokrasi. Hal ini tidak terlepas dari cara pandang warisan kolonialisme masa lalu yang terus dipelihara dan dilestarikan.

Pada era *good governance* dewasa ini, cara pandang semacam itu sudah seharusnya ditinggalkan. Masyarakat sebagai pemegang saham harus memainkan peranan penting mulai dari tahap perumusan kebijakan sampai pada pemanfaatan hasilnya. Pemerintah adalah pelayanan masyarakat yang selama ini lebih banyak merupakan slogan, sudah saatnya untuk diwujudkan.

### **Sumber Daya Aparatur**

Selain keuangan, faktor lain yang menentukan keberhasilan implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia adalah aspek sumber daya manusia, khususnya sumber daya aparatur. Disebutkan demikian karena di negara berkembang, aparatur pemerintah masih memegang peranan dominan-meskipun peranan ini secara bertahap tetapi pasti harus dialihkan kepada masyarakat.

Kehadiran UU Nomor 22/1999, khususnya pasal 76, telah dan akan mengubah sistem kepegawaian di lingkungan organisasi pemerintah. Pada masa lalu, berdasarkan UU Nomor 8/1974, yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 43/1999, digunakan sistem kesatuan (*unified system*) di dalam manajemen PNS. Artinya, PNS adalah pegawai pemerintah nasional, yang digaji oleh pemerintah pusat dan ditempatkan di seluruh Indonesia. Dengan adanya pasal 76 UU Nomor 22/1999 manajemen tersebut diubah menjadi sistem terpisah (*separated system*). Dengan sistem tersebut, daerah mengangkat, menempatkan, menggaji, mengembangkan serta memberhentikan pegawainya sendiri.

Perubahan sistem tersebut membawa dampak positif maupun negatif bagi PNS maupun bagi masyarakat. Dampak positifnya antara lain :

- 1) Terbuka peluang untuk meniti karier secara lebih cepat
- 2) Pengurusan proses kepegawaian menjadi lebih cepat dan efisien
- 3) Terbukanya peluang bagi penduduk setempat-khususnya putra daerah- untuk memegang jabatan penting yang selama ini didominasi oleh orang-orang yang dekat dengan akses kekuasaan di pusat

Dampak negatif yang sudah mulai nampak antara lain :

- 1) Munculnya rasa kedaerahan yang sempit dalam rekrutmen pegawai maupun dalam pengisian jabatan
- 2) Para pegawai terjebak oleh “sindroma myopa”, karena hanya akan berkarier dari awal sampai akhir di satu daerah saja
- 3) Mutasi dan rotasi antar daerah maupun antar tingkatan pemerintahan menjadi relatif terbatas.

Di luar masalah kepegawaian yang berkaitan dengan implementasi otonomi daerah, sistem kepegawaian nasional nampaknya sedang menghadapi masalah besar antara lain :

- 1) Belum adanya rencana nasional mengenai kepegawaian yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah sehingga masing-masing daerah membuat rencana sendiri.
- 2) Adanya ketimpangan pegawai dilihat dari jumlah, distribusi lokasi, distribusi keahlian.
- 3) Manajemen kepegawaian yang masih menggunakan pola tahun 1970-an dengan berbasis pada paradigma birokrasi gaya Weberian.
- 4) Tidak adanya pengukuran kinerja individual yang sahih, sehingga tidak nampak hubungan yang signifikan antara pemberian imbalan dengan kinerja
- 5) Masih berorientasi pada senioritas dan kedudukan struktural daripada kompetensi dalam jabatan.

Apabila ada pandangan bahwa masa depan bangsa Indonesia terletak pada kearifan dalam mengelola desentralisasi dan otonomi daerah, maka diperlukan pembenahan secara mendasar pada manajemen keuangan publik maupun manajemen sumber daya aparatur. Karena kedua aspek tersebut nampaknya menjadi faktor penentu bagi keberhasilan implementasi otonomi daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Campo-Salvatore Schiavo and P.S.A.Sundaram, 2001. *To Serve and To Preserve Improving Public Administration in A Competitive World*. Asian Development Bank. Manila. Philippines.
- Cheema.G.Shabbir and Dennis A. Rondinelli, 1983. *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Sage Publications, Beverly Hills, London, New Delhi.
- Litvack, Jennie and Jessica Seddon, editors, 1999. *Decentralization-Briefing Notes-World Bank Institute*.
- Sadu Wasistiono, 2001. *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Penerbit Alqaprint. Bandung.
- Sadu Wasistiono, 2002. *Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Alqaprint. Bandung.

**PERBANDINGAN ANTARA APBD DENGAN DANA PERIMBANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2001 PADA 82 KABUPATEN/KOTA SEINDONESIA**

*Lampiran 1*

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH APBD (Rp. Milyar)	JUMLAH DANA PERIMBANGAN (Rp. Milyar)	% DANA PERIMBAN GAN THD APBD
1	Kota Banda Aceh	91,198,131,000		-
2.	Kab. Aceh Utara	735,831,723,000	699,064,727,000	95
3.	Kota Binjai	148,993,189,000	117,966,492,000	79
4.	Kota Pematang Siantar	51,504,605,000		-
5.	Kab. Nias	211,463,504,000	199,000,242,000	94
6.	Kab. Labuhan Ratu	209,097,349,000	192,326,353,000	92
7.	Kab. 50 Kota	56,168,275,000		-
8.	Kab. Pasaman	178,382,798,160	166,152,891,100	93
9.	Kota Sawahlumto	42,972,764,562	41,197,249,402	96
10.	Kab. Kampar	471,743,932,622	444,412,936,000	94
11.	Kab. Indragiri Ulu	82,750,125,000		-
12.	Kota Batam	212,525,586,000	175,279,586,000	82
13.	Kab. Kerinci	70,509,928,000		-
14.	Kab. Bungo	121,424,656,000	119,546,791,028	98
15.	Kab. T. Jabung Barat	115,185,143,000	104,845,094,853	91
16.	Kab. Belitung	140,449,943,866	75,319,842,000	54
17.	Kab. Musi Rawas	273,518,544,950	255,750,741,000	94
18.	Kab. Ogan Kemering I	308,810,102,400	292,232,853,600	95
19.	Kab. Muara Enim	296,398,130,000		-
20.	Kab. Bengkulu Utara	76,361,967,000		-
21.	Kab. Rejang Lebong	154,494,407,827	145,125,750,000	94
22.	Kab. Lampung Barat	106,462,957,300	101,408,921,000	95
23.	Kab. Lampung Utara	240,218,999,500	232,032,131,108	97
24.	Kota Bandar Lampung	206,967,913,484	181,166,400,000	88
25.	Kota Tangerang	318,780,000,000	226,780,000,000	71
26.	Kab. Serang	294,881,699,374	258,718,256,224	88
27.	Kab. Lebak	210,318,983,200	204,409,781,800	97
28.	Kab. Sukabumi	340,638,738,000	310,846,850,000	91
29.	Kab. Bekasi	352,448,326,777	277,131,714,113	79
30.	Kab. Bogor	599,139,276,000	517,673,628,000	86
31.	Kab. Kudus	199,649,511,000	180,640,655,000	90
32.	Kab. Grobogan	260,034,242,000	243,270,000,000	94
33.	Kab. Cilacap	364,217,275,000	325,043,875,000	89
34.	Kab. Wonosobo	229,119,107,000	210,824,925,000	92
35.	Kab. Semarang	222,957,529,000		-
36.	Kab. Tegal	102,026,563,000		-
37.	Kota Yogyakarta	205,467,015,000	153,014,249,000	74
38.	Kab. Bantul	97,002,853,484		-
39.	Kota Kediri	62,997,857,889	45,864,959,543	73
40.	Kab. Trenggalek	239,068,519,752	220,751,514,069	92
41.	Kota Surabaya	464,818,850,010	278,115,051,000	60
42.	Kab. Pacitan	214,069,331,498	199,426,964,040	93
43.	Kab. Gresik	248,834,408,500	191,715,449,000	77
44.	Kab. Pamekasan	210,592,669,705	199,096,518,712	95
45.	Kota Malang	267,633,550,520	218,696,636,370	82

46.	Kab. Bondowoso	274,151,446,003	259,000,420,335	94
47.	Kab. Badung	455,605,820,451	143,516,664,000	32
48.	Kab. Karangasem	161,833,877,430	111,110,227,480	69
49.	Kab. Kupang	225,269,813,000	219,822,503,000	98
50.	Kab. Timor Tengah Sel.	199,745,363,000	189,707,081,000	95
51.	Kab. Sumbawa	233,993,174,974	214,746,151,756	92
52.	Kab. Lombok tengah	216,860,964,000	205,262,833,055	95
53.	Kota Pontianak	213,175,811,000	192,370,012,000	90
54.	Kab. Sintang	190,534,329,702	167,083,538,000	88
55.	Kab. Pontianak	186,414,357,000	178,465,379,000	96
56.	Kab. Kapuas Hulu	141,629,127,430	134,560,250,000	95
57.	Kab. Barito Utara	160,980,020,133	146,087,244,283	91
58.	Kab. Kapuas	249,038,917,000	236,348,917,000	95
59.	Kab. Kotabaru	176,254,536,280	146,140,161,000	83
60.	Kab. Hulu S. Tengah	138,407,887,991	116,395,729,743	84
61.	Kab. Barito Kuala	102,505,962,415	97,317,219,755	95
62.	Kab. Hulu S. Selatan	121,841,052,950	103,610,744,000	85
63.	Kab. Kutai	887,154,837,878	876,920,727,233	99
64.	Kab. Bulangan	92,503,014,922	-	-
65.	Kab. Berau	370,307,524,932	350,620,000,000	95
66.	Kab. Pasir	423,250,991,943	410,636,589,440	97
67.	Kota Bitung	86,390,646,318	72,656,237,131	84
68.	Kab. B. Mongondow	151,729,771,128	147,324,193,128	97
69.	Kota Gorontalo	99,334,859,000	94,325,559,000	95
70.	Kota Palu	115,477,658,000	103,871,643,522	90
71.	Kab. Banggai	154,034,980,470	137,235,747,450	89
72.	Kab. Poso	214,910,135,918	205,699,964,000	96
73.	Kota Makassar	344,712,776,600	289,483,638,000	83
74.	Kab. Jeneponto	97,092,569,310	92,147,128,000	95
75.	Kab. Wajo	112,003,755,000	108,328,110,000	97
76.	Kab. Gowa	177,509,037,706	160,581,549,667	90
77.	Kab. Luwu	178,449,884,000	160,479,865,000	90
78.	Kab. Takalar	110,353,453,800	102,361,590,000	93
79.	Kab. Pinrang	133,462,423,289	120,619,786,000	90
80.	Kab. Bantaeng	72,124,157,500	68,252,879,300	95
81.	Kab. Kolaka	147,525,186,283	142,257,928,283	96
82.	Kab. Kendari	252,662,113,910	230,805,196,479	91
Jumlah		17,777,363,120,425,000	14,538,003,435,002,000	
Rata-rata		216,797,111,225	204,760,611,761	77

Sumber : Buku Profil Kabupaten/Kota se-Indonesia Jilid I (Kompas, 2002)

**PERBANDINGAN ANTARA ANGGARAN RUTIN  
DENGAN ANGGARAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2001  
PADA 82 KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA**

*Lampiran 2*

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH APBD (Rp. Milyar)	ANGGARAN RUTIN (Rp. Milyar)	ANGGARAN PEMBANGUNAN THD APBD
1.	Kota Banda Aceh	91,198,131,000	28,698,232,000	62,499,899,000
2.	Kab. Aceh Utara	735,831,723,000	271,411,377,000	464,420,346,000
3.	Kota Binjai	148,993,189,000	86,499,101,000	62,494,086,000
4.	Kota Pematang Siantar	51,504,605,000	40,090,036,000	11,414,569,000
5.	Kab. Nias	211,463,504,000	106,717,485,000	104,746,019,000
6.	Kab. Labuhan Ratu	209,097,349,000	149,698,894,000	59,398,455,000
7.	Kab. 50 Kota	56,168,275,000	32,582,480,000	20,057,944,000
8.	Kab. Pasaman	178,382,798,160	126,647,363,410	51,735,434,745
9.	Kota Sawahlumto	42,972,764,562	33,063,893,062	9,908,871,500
10.	Kab. Kampar	471,743,932,622	196,257,588,444	275,486,349,178
11.	Kab. Indragiri Ulu	82,750,125,000	34,338,998,000	45,212,234,000
12.	Kota Batam	212,525,586,000	120,384,052,605	92,141,533,395
13.	Kab. Kerinci	70,509,928,000	47,545,149,000	22,964,779,000
14.	Kab. Bungo	121,424,656,000	85,231,731,000	42,189,925,000
15.	Kab. T. Jabung Barat	115,185,143,000	59,582,058,000	52,825,605,000
16.	Kab. Belitung	140,449,943,866	125,026,304,286	15,423,639,580
17.	Kab. Musi Rawas	273,518,544,950	193,067,354,156	80,451,190,800
18.	Kab. Ogan Kemerang I	308,810,102,400	189,998,755,225	118,813,347,175
19.	Kab. Muara Enim	296,398,130,000	162,508,314,890	133,889,130,800
20.	Kab. Bengkulu Utara	76,361,967,000	43,287,698,000	31,018,085,000
21.	Kab. Rejang Lebong	154,494,407,827	114,138,414,350	40,355,993,477
22.	Kab. Lampung Barat	106,462,957,300	67,768,681,394	38,724,275,906
23.	Kab. Lampung Utara	240,218,999,500	125,730,309,500	114,487,690,000
24.	Kota Bandar Lampung	206,967,913,484	163,607,923,484	43,359,990,000
25.	Kota Tangerang	318,780,000,000	185,140,000,000	133,640,000,000
26.	Kab. Serang	294,881,699,374	243,560,925,250	51,320,774,124
27.	Kab. Lebak	210,318,983,200	149,568,983,200	60,750,000,000
28.	Kab. Sukabumi	340,638,738,000	229,236,118,000	111,420,620,000
29.	Kab. Bekasi	352,448,326,777	254,252,264,121	98,196,062,656
30.	Kab. Bogor	599,139,276,000	430,027,636,000	169,111,640,000
31.	Kab. Kudus	199,649,511,000	153,106,792,000	33,417,213,400
32.	Kab. Grobogan	260,034,242,000	158,976,930,000	91,057,312,000
33.	Kab. Cilacap	364,217,275,000	300,115,540,000	64,101,735,000
34.	Kab. Wonosobo	229,119,107,000	195,886,699,000	33,232,408,000
35.	Kab. Semarang	222,957,529,000	140,988,626,000	62,996,545,000
36.	Kab. Tegal	102,026,563,000	70,613,524,000	26,485,100,000
37.	Kota Yogyakarta	205,467,015,000	186,336,774,000	19,130,241,000
38.	Kab. Bantul	97,002,853,484	65,021,442,460	26,745,497,387
39.	Kota Kediri	62,997,857,889	50,378,987,837	12,618,872,052
40.	Kab. Trenggalek	239,068,519,752	166,917,235,901	72,151,283,851
41.	Kota Surabaya	464,818,850,010	391,582,000,000	78,236,850,010
42.	Kab. Pacitan	214,069,331,498	153,066,186,181	61,003,145,317
43.	Kab. Gresik	248,834,408,500	198,838,008,950	49,996,399,550
44.	Kab. Pamekasan	210,592,669,705	150,270,751,205	60,321,918,500
45.	Kota Malang	267,633,550,520	208,681,386,636	58,952,163,884
46.	Kab. Bondowoso	274,151,446,003	219,011,438,559	55,140,007,444

47.	Kab. Badung	455,605,820,451	213,003,104,194	242,602,716,257
48.	Kab. Karangasem	161,833,877,430	101,331,435,351	60,502,442,079
49.	Kab. Kupang	225,269,813,000	160,738,433,000	64,531,380,000
50.	Kab. Timor Tengah Sel.	199,745,363,000	14,255,548,900	185,489,814,100
51.	Kab. Sumbawa	233,993,174,974	114,282,946,026	101,350,334,000
52.	Kab. Lombok tengah	216,860,964,000	145,860,964,000	71,000,000,000
53.	Kota Pontianak	213,175,811,000	151,340,338,000	61,835,472,000
54.	Kab. Sintang	190,534,329,702	123,097,131,162	67,437,198,540
55.	Kab. Pontianak	186,414,357,000	144,976,357,000	41,438,000,000
56.	Kab. Kapuas Hulu	141,629,127,430	73,672,808,000	67,956,319,430
57.	Kab. Barito Utara	160,980,020,133	78,869,648,734	82,110,371,133
58.	Kab. Kapuas	249,038,917,000	159,364,622,000	89,674,295,000
59.	Kab. Kotabaru	176,254,536,280	93,904,674,029	82,349,862,251
60.	Kab. Hulu S. Tengah	138,407,887,991	87,797,671,741	50,610,216,250
61.	Kab. Barito Kuala	102,505,962,415	67,938,983,265	34,566,979,150
62.	Kab. Hulu S. Selatan	121,841,052,950	91,442,770,450	30,398,052,950
63.	Kab. Kutai	887,154,837,878	381,444,643,000	505,710,191,878
64.	Kab. Bulangan	92,503,014,922	37,946,615,440	37,945,933,321
65.	Kab. Berau	370,307,524,932	129,998,600,932	192,788,924,000
66.	Kab. Pasir	423,250,991,943	162,152,132,413	261,098,959,943
67.	Kota Bitung	86,390,646,318	64,567,179,318	21,823,467,000
68.	Kab. B. Mongondow	151,729,771,128	111,255,960,128	40,473,811,000
69.	Kota Gorontalo	99,334,859,000	59,770,357,300	35,564,871,000
70.	Kota Palu	115,477,658,000	89,306,644,351	26,477,658,379
71.	Kab. Banggai	154,034,980,470	102,083,786,650	51,951,193,820
72.	Kab. Poso	214,910,135,918	137,471,978,500	77,438,157,418
73.	Kota Makassar	344,712,776,600	278,191,439,580	66,521,337,020
74.	Kab. Jeneponto	97,092,569,310	76,683,876,310	20,408,693,000
75.	Kab. Wajo	112,003,755,000	96,574,166,000	25,429,589,000
76.	Kab. Gowa	177,509,037,706	110,436,096,219	67,072,941,487
77.	Kab. Luwu	178,449,884,000	113,904,809,500	64,545,074,500
78.	Kab. Takalar	110,353,453,800	76,104,372,331	34,249,081,469
79.	Kab. Pinrang	133,462,423,289	95,952,668,289	37,509,755,000
80.	Kab. Bantaeng	72,124,157,500	43,266,659,891	28,857,397,609
81.	Kab. Kolaka	147,525,186,283	99,125,186,283	48,400,000,000
82.	Kab. Kendari	252,662,113,910	220,228,599	32,433,825,311
	Jumlah	17,777,363,120,425,000	10,993,763,174,992,000	6,429,599,499,026,000
	Rata-rata	216,797,111,225	134,070,282,622	78,409,749,988
	%		61.84136028	36.16734077

Sumber : Buku Profil Kabupaten/Kota se-Indonesia Jilid I (Kompas, 2002)